

KAMPUNG SEGITIGA SOMPILAN: DINAMIKA RUANG DAN KEARIFAN LOKAL

Munarsi Munandar¹, Cahyani Suhardi², Dui Buana Mustakima³
^{1,2,3}Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako
Email: munarsi.m@untad.ac.id¹

Article Info: Received: 15 September 2025, Accepted: 03 December 2025, Published: 05 December 2025

ABSTRACT.

Rapid urbanization in Yogyakarta has driven the transformation of urban settlements, including the Sompilan Block in Pogung Kidul Village, which is now facing pressure from land commercialization and infrastructure development. The problem of this research is to examine how the spatial configuration of the Sompilan Block is formed through the social practices of residents and local values that influence its spatial pattern. This study uses a qualitative, naturalistic approach. Data collection involved observation, physical measurements, and in-depth interviews. Data analysis was conducted by integrating Henri Lefebvre's theory of spatial production. The results show that the Sompilan Block is formed by a triangular street network that encompasses an organic residential pattern, with a stable center and more dynamic edges with multifunctional buildings. These findings suggest that the Sompilan Block did not develop due to the "lack" of formal systems, but rather is the result of complex and adaptive spatial production: organic morphology is formed from land inheritance, land distribution, and road construction; emotional attachment to the village encourages residents to remain despite urbanization. This encourages the development of social practices such as ngindung and overlapping (hybrid) land and building ownership systems. Thus, the space in Sompilan is a space of continuous negotiation between economic needs, cultural values, and formal infrastructure interventions, which results in a dynamic spatial configuration of an urban village.

Keywords: adaptation; urban kampung; spatial configuration; local values; production of space.

ABSTRAK.

Urbanisasi yang pesat di Yogyakarta telah mendorong transformasi kampung kota, termasuk Blok Sompilan di Kampung Pogung Kidul, yang kini menghadapi tekanan akibat komersialisasi lahan dan pembangunan infrastruktur kota. Permasalahan penelitian ini adalah menelaah bagaimana konfigurasi spasial Blok Sompilan terbentuk melalui praktik sosial warga serta nilai-nilai lokal yang memengaruhi pola spasialnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Pengumpulan data dengan observasi, pengukuran data fisik dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan teori produksi ruang Henri Lefebvre. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blok Sompilan dibentuk oleh jaringan jalan berbentuk segitiga yang mengurung pola hunian organik dimana bagian tengah stabil sedangkan bagian tepi lebih dinamis dengan bangunan multifungsi. Temuan ini menunjukkan bahwa Blok Sompilan tidak tumbuh karena "kekurangan" sistem formal, melainkan merupakan hasil produksi ruang yang kompleks dan adaptif: morfologi organik terbentuk dari pewarisan lahan, pembagian kapling dan pembangunan jalan; adanya ikatan emosional terhadap kampung mendorong warga untuk tetap bertahan di tengah urbanisasi. Sehingga mengembangkan praktik sosial seperti ngindung serta sistem kepemilikan lahan bangunan yang tumpang-tindih (hibrid). Sehingga ruang di Sompilan adalah ruang negosiasi terus-menerus antara kebutuhan ekonomi, nilai kultural, dan intervensi infrastruktur formal, sehingga menghasilkan konfigurasi spasial kampung kota yang dinamis.

Kata kunci: adaptasi; kampung kota; konfigurasi spasial; nilai lokal; produksi ruang.

PENDAHULUAN

Urbanisasi serta pertumbuhan kawasan permukiman dan infrastruktur modern di Indonesia telah mengubah lanskap perkotaan. Namun demikian, kampung-kampung kota tetap bertahan sebagai bagian penting dari struktur perkotaan (Husin et al., 2021). Sekhani et al. (2022) menyatakan bahwa sekitar seperenam populasi di dunia tinggal di permukiman informal. Di Jakarta, sekitar 20–30% lahan perkotaan ditempati oleh kampung-kampung yang dikategorikan sebagai permukiman informal. Kawasan ini kerap digambarkan tidak terencana dan kumuh padahal pada kenyataannya memiliki morfologi ruang yang luwes, alami, serta tumbuh secara organik, berbeda dari pola tata kota formal (Atika & Ikaputra, 2023).

Menurut KBBI, informalitas menggambarkan kondisi ketika sesuatu berlangsung di luar ikatan aturan atau tata cara formal yang berlaku (KBBI, 2025). Permukiman informal adalah kawasan hunian yang diproduksi dan dihuni di luar kerangka hukum serta perencanaan formal, ditandai oleh keterbatasan akses layanan dasar, ketidak-sesuaian standar bangunan, ketidakpastian hak atas tanah, dan ketidakpatuhan tata ruang (UN-Habitat, 2025). Permukiman informal menunjukkan karakter morfologinya melalui pemanfaatan ruang-ruang marjinal kota, seperti kawasan tepi air (sungai dan pantai), lereng-lereng curam, jalur infrastruktur transportasi (jembatan dan rel kereta api), hingga ruang-ruang sempit di balik dinding jalan (Dovey & King, 2011). Informalitas di Perkotaan seringkali muncul dengan status *Quasi-Legal* yang berarti tidak sepenuhnya sah secara hukum namun juga tidak sepenuhnya dianggap ilegal karena seringkali dibiarkan dan ditoleransi atau bahkan diterima oleh masyarakat maupun pemerintah (Fouad & Abbas, 2021; Mohanty, 2020). Lutzoni (2016) menegaskan bahwa hubungan antara kota formal (*formal city*) dan kota informal (*informal city*) selalu berubah. Kota informal memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial-ekonomi, sedangkan perencanaan kota yang formal menawarkan struktur permanen. Tidak ada batas tegas di antara keduanya; justru pada ruang abu-abu inilah muncul praktik sosial sehari-hari yang mempertemukan kebutuhan struktural kota (pasar, jalan) dengan kreativitas warga informal (misalnya pedagang kaki lima).

Meskipun tumbuh di luar kendali, kampung dan permukiman informal merupakan bagian tak

terpisahkan dari struktur kota (Dovey & King, 2011). Kota tidak akan berkelanjutan tanpa keberadaan kampung dan permukiman informal. Keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti lahan, pekerjaan sektor formal, dan hunian terjangkau yang tidak sebanding dengan laju urbanisasi justru mendorong tumbuhnya permukiman informal sebagai bentuk pembangunan kota yang paling cepat (Dovey & King, 2011). Melalui praktik-praktik ekonomi, sosial, dan spasial yang fleksibel, sektor informal justru memberikan kontribusi nyata bagi dinamika kota serta pertumbuhan ekonomi masyarakat (Dovey, 2012). Dengan demikian, informalitas tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai simbol keterbelakangan atau kekurangan, melainkan sebagai wujud kreativitas perkotaan yang lahir dari kemampuan warga beradaptasi terhadap keterbatasan.

Henri Lefebvre memandang ruang bukan sekadar wadah fisik, melainkan produk sosial yang terbentuk dari relasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ibadi, 2023). Ruang selalu terikat dengan waktu, bersifat cair dan dinamis, serta terus berubah seiring praktik kehidupan masyarakat (Sugiyono, 2022). Ia menjelaskan produksi ruang melalui tiga ranah dialektis: praktik spasial yang mencerminkan rutinitas sehari-hari, representasi ruang yang diciptakan oleh perencana dan ahli, serta ruang representasi yang berisi simbol, imajinasi, dan memori kolektif masyarakat (Solak, 2022). Dengan demikian, kota tidak hanya dipahami sebagai kumpulan bangunan atau interaksi sosial, tetapi sebagai hasil interseksi kompleks antara aspek politik, ekonomi, infrastruktur, nilai, dan budaya yang saling membentuk dan dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari warganya (Ibadi, 2023).

Permasalahan Penelitian

Banyak penelitian masih melihat kampung dan permukiman informal hanya sebagai masalah fisik, kumuh, tidak teratur, dan harus ditertibkan—tanpa memperhatikan dimensi sosial dan budaya yang melekat di dalamnya (Dovey & King, 2011). Pandangan negatif yang menyamakan kampung dengan kekumuhan dan pelanggaran aturan Harjoko (2011) sering melahirkan kebijakan yang bersifat penertiban atau formalisasi, yang pada akhirnya justru meminggirkan pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil (Nabila, 2023). Sementara itu, meskipun teori produksi ruang Lefebvre banyak digunakan untuk membaca konflik antara ruang abstrak hasil perencanaan dari atas dan

ruang sosial yang dijalankan masyarakat (Sugiyono, 2022), penggabungan teori ini dengan analisis bentuk ruang pada skala kecil dan penilaian nilai-nilai lokal masih jarang dilakukan. Keragaman dan dinamika permukiman informal pada skala kecil, misalnya di tingkat blok kampung, masih jarang diperhatikan (Hanli & Lianto, 2020). Akibatnya, penelitian tentang bentuk kampung lebih banyak terjebak pada pengelompokan atau pendekatan yang kaku hanya untuk mengklasifikasi bentuk fisik, sehingga mengabaikan nilai budaya serta praktik kehidupan sehari-hari masyarakat (Harjoko, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada Blok Sompilan di Kampung Pogung Kidul, Yogyakarta, yang merupakan bagian dari kampung kota organik. Hingga saat ini, belum ada studi yang secara komprehensif menggabungkan kerangka produksi ruang Lefebvre dengan analisis morfologi mikro serta telaah nilai budaya lokal dalam konteks kampung kota. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk membaca kampung tidak semata sebagai objek fisik, melainkan sebagai ruang hidup yang diproduksi, dijalani, dan dimaknai oleh warganya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik untuk memahami kampung dari dalam konteks kehidupan warganya. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi fisik, dan wawancara mendalam guna mengungkapkan praktik ruang sehari-hari serta nilai lokal yang membentuk konfigurasi spasial. Analisis dilakukan dengan menggabungkan teori produksi ruang Lefebvre—meliputi praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasi—dengan studi morfologi kampung untuk membaca pola, struktur, dan jaringan ruang pada skala mikro (blok).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan konfigurasi Blok Sompilan, tetapi juga mengungkap narasi produksi ruang berbasis lokalitas di tengah tekanan urbanisasi. Pendekatan yang memadukan teori Lefebvre dan nilai lokal diharapkan menjadi kontribusi baru bagi studi arsitektur dan perencanaan kota di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif naturalistik dengan pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan empiris. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami fenomena produksi ruang bukan

secara umum, tetapi secara detail dalam konteks sosial-budaya dan spasial yang khas pada kampung tersebut. Penelitian studi kasus dilakukan agar dapat dilakukan telaah secara menyeluruh berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari kondisi fisik, sosial dan budaya, yang bersama-sama membentuk konfigurasi ruang kampung.

Dalam penelitian naturalistik kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertanggung jawab menentukan objek studi, menggali data, membuat pedoman wawancara, menganalisis data, dan melakukan interpretasi. Instrumen bantu yang digunakan meliputi rol meter untuk pengukuran fisik, kamera untuk dokumentasi visual, *logbook* untuk pencatatan dan sketsa lapangan, pedoman wawancara tidak terstruktur untuk memandu penggalian informasi, serta *recorder* untuk merekam percakapan dengan informan.

Alur metodologi penelitian dilakukan secara bertahap untuk memastikan data yang diperoleh lengkap dan mendalam. Tahap persiapan yaitu peneliti menyelaraskan fokus kajian, meninjau teori yang relevan, melakukan observasi awal, lalu menentukan sumber data, teknik pengumpulan, dan instrumen penelitian. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan, dimulai dengan pengumpulan data fisik (lingkungan, fungsi bangunan, aktivitas kawasan), dianalisis secara awal dengan membagi kawasan ke dalam segmen. Hasil analisis dipakai untuk memilih informan kunci, lalu dilakukan wawancara mendalam dengan teknik *iterative sampling*, yaitu setiap hasil wawancara digunakan untuk menentukan informan berikutnya. Tahap terakhir yaitu tahap penyelesaian yaitu melakukan reduksi data, identifikasi kecenderungan utama, serta interpretasi mendalam berdasarkan teori.

Sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data fisik dan data non-fisik. Data fisik dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan pengukuran langsung, meliputi bangunan (perletakan, bentuk, orientasi, dimensi, material, fungsi), lahan (perletakan, ketinggian relatif), pohon (posisi, tinggi, diameter batang, kerindangan), pagar (perletakan, ketinggian, kerapatan), *signage* (posisi, ketinggian, dimensi), tiang utilitas (posisi, ketinggian, diameter), serta tugu/tetenger (posisi, ketinggian, ukuran). Data non-fisik diperoleh melalui wawancara mendalam dengan warga dan pengamatan langsung, mencakup sejarah kawasan, status kepemilikan

lahan dan bangunan, serta alasan pemilihan lokasi hunian.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada skala meso (blok kampung) dan makro (konteks kampung Pogung Kidul) untuk melihat hubungan antara konfigurasi spasial dan praktik sosial. Analisis tingkat rumah atau perubahan hirarki ruang di dalam hunian tidak dilakukan secara rinci karena keterbatasan waktu dan akses.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan spasial. Data spasial dianalisis melalui pemetaan elemen fisik, seperti jaringan jalan, fungsi bangunan, vegetasi, dan batas kawasan. Data non-fisik dianalisis dengan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola nilai lokal, strategi adaptasi, dan hubungan antaraktor. Proses analisis mengacu pada kerangka teori *The Production of Space* untuk menginterpretasikan keterkaitan antara konfigurasi spasial, representasi ruang, dan makna simbolik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Spasial Blok Sompilan

1. Kondisi Awal dan Sejarah Pembentukan Blok Sompilan

Sebelum terbangunnya jaringan jalan yang sekarang membentuk segitiga, kawasan Sompilan merupakan lahan pertanian dan kebun yang disirami oleh Selokan Mataram. Selokan Mataram adalah kanal irigasi sepanjang sekitar 31,2 km yang dibangun pada tahun 1942 atas prakarsa Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengairi ribuan hektar lahan di Yogyakarta.

Kanal ini membuka akses air bagi warga Pogung Kidul dan menjadi urat nadi pertanian setempat. Dua keluarga, yakni Mbah Mangun dan Mbah Tris, membuka ladang dan mendirikan beberapa rumah bambu (*omah gedhek*) di sepanjang lahan ini. Melalui proses pewarisan dan penjualan, lahan dibagi menjadi petak-petak yang kemudian dihuni kerabat dan pendatang. Saat itu akses menuju Sompilan hanya berupa jalan setapak; persil rumah dikelilingi halaman luas dengan pepohonan dan kebun. Penduduk hidup dari bertani, memelihara ternak, dan berdagang kecil di sepanjang jalan setapak. Penduduk awal diperkirakan berjumlah puluhan kepala keluarga dengan rumah yang tersebar tidak beraturan mengikuti kontur lahan

Perubahan besar terjadi ketika pemerintah membangun Jalan Jembatan Baru UGM di sisi

barat dan meningkatkan jalan di tepi Selokan Mataram menjadi kolektor.

Pada tahun 2006 pemerintah membangun proyek jalan dan jembatan yang menghubungkan Teknika Utara dan Jalan Monjali. Menurut penuturan informan, pada mulanya jalan penghubung seharusnya berada di dekat balai desa (utara sompilan). Melihat kondisi alternatif jalan balai desa sebagian besar merupakan tanah pribadi warga, sedangkan jalan (sekarang) bagian selatan sebagian merupakan tanah milik UGM, sebagian besar lainnya adalah tanah kas desa dan sedikit saja tanah pribadi warga (Gambar 1). Jalan-jalan baru ini memotong lahan pertanian dan menciptakan kerangka segitiga yang mengurung pemukiman. Akses kendaraan meningkat dan nilai lahan di tepian melonjak. Penduduk mulai memanfaatkan lahan depan rumah untuk warung, kios dan kos-kosan, sedangkan rumah lama direnovasi menjadi rumah beton bertingkat. Dengan demikian, perkembangan Blok Sompilan berlangsung dari hamparan sawah menjadi permukiman organik dengan pusat hunian stabil dan tepian dinamis. Data mengenai luas wilayah (sekitar 3 900–4 600 m²) dan jumlah penduduk diperoleh dari wawancara tokoh masyarakat; mereka menyebutkan bahwa saat ini terdapat puluhan kepala keluarga.



Gambar 1. Sompilan Sebelum Pembangunan Jalan Jembatan Baru
(Sumber: Peta Google Tahun 2006 dimodifikasi Peneliti)

2. Konfigurasi Struktur Jalan dan Blok

Blok Sompilan terbentuk oleh sistem jalan yang menyerupai segitiga (Gambar 2). Sisi barat kawasan dibatasi oleh Jalan Jembatan Baru UGM yang berfungsi sebagai jalan arteri yang menghubungkan kampus UGM dengan wilayah luar. Di sisi timur-laut terdapat Jalan Selokan

Mataram sebagai jalan kolektor yang mengikuti saluran irigasi; ruas ini memfasilitasi sirkulasi kendaraan di sepanjang jalur utara-selatan dan terhubung ke jaringan jalan kampung yang lebih kecil. Sisi tenggara dibatasi oleh Jalan Pogung Kidul yang kemudian bercabang menjadi Jalan Teknik Utara dan Teknik Selatan, menciptakan simpul lalu lintas berbentuk Y yang memperkuat akses menuju kawasan kampus. Ketiga ruas jalan utama tersebut membentuk kerangka segitiga yang mengurung kelompok bangunan di dalamnya. Pola blok yang terbentuk bersifat organik, mengikuti kontur lahan, sehingga rumah-rumah menempel pada batas jalan utama sedangkan area tengah diisi oleh hunian.



Gambar 2. Struktur Jalan di Blok Sompilan
(Sumber: Analisis Penulis, 2025)

3. Perubahan Fungsi dan Tata Guna

Perubahan fungsi dan tata guna di Blok Sompilan memperlihatkan adaptasi dinamis warga terhadap peluang ekonomi dan tekanan eksternal. Peta sebaran fungsi bangunan (Gambar 4) menunjukkan adanya keragaman fungsi: rumah tinggal, rumah kos/kontrakan, usaha toko/jasa, usaha boga, fasilitas peribadatan, serta ruang terbuka hijau.

Zona Tengah (Hunian Warisan). Bagian tengah blok didominasi oleh rumah tinggal keluarga yang diwariskan turun-temurun. Pada masa lalu, rumah berupa *omah gedhek* dengan halaman luas yang memungkinkan interaksi antar tetangga. Kini, sebagian rumah telah direnovasi menjadi rumah beton bertingkat, tetapi fungsi utama sebagai hunian tetap dipertahankan.

Zona Tepi (Multifungsi). Sisi-sisi yang berbatasan dengan jalan utama berkembang menjadi area multifungsi. Hampir seluruh bangunan di tepi jalan berfungsi ganda: lantai dasar dipakai untuk usaha (toko, warung, jasa servis, laundry, rumah makan), sementara lantai

atas difungsikan sebagai hunian atau kamar kos. Sebaran usaha mencakup sedikitnya 10 unit, terdiri atas 4 usaha milik warga dan 6 usaha milik pendatang.

Dalam jangka panjang, beberapa rumah tradisional berubah menjadi rumah beton bertingkat. Lahan kosong diadaptasi menjadi rumah kontrakan atau kos-kosan, sedangkan halaman dimanfaatkan sebagai warung atau kios. Contoh penting adalah deretan rumah kos di sisi timur yang sebelumnya rumah tinggal, kemudian dibagi menjadi kamar-kamar sewaan bagi mahasiswa. Di sisi selatan, sejumlah bangunan pernah digunakan untuk berbagai usaha seperti penjualan poster, toko buku, jasa servis laptop, tempat kebugaran, hingga warung makan.

Perubahan fungsi juga tampak pada lahan sewa, misalnya di sisi utara, di mana pemilik tanah (Pak Broto Waluyo) menyewakan lahannya, sementara bangunan didirikan oleh penyewa dengan material semi permanen. Praktik serupa terlihat pada area *ngindung*, yaitu ruang-ruang marginal di tepi jalan yang digunakan untuk warung, angkringan, atau gerobak tanpa status kepemilikan formal.

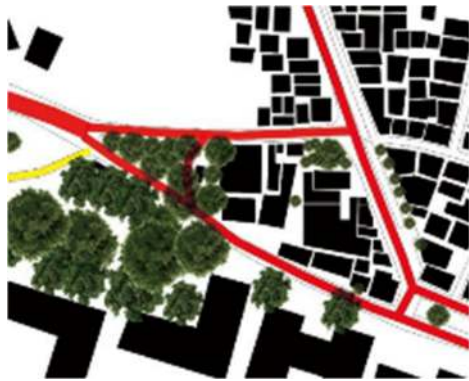
Pembangunan Jalan Jembatan Baru UGM menjadi pemicu penting yang membuka akses baru dan meningkatkan arus kendaraan. Kondisi ini menjadikan tepian jalan sebagai zona bernilai komersial tinggi, sehingga mendorong tumbuhnya fungsi ganda (rumah-usaha) dan praktik *ngindung* sebagai bentuk adaptasi warga.

Aktivitas ekonomi informal di Blok Sompilan cenderung terkonsentrasi di sepanjang jalan utama. Warung, kos-kosan, dan kios kecil menempel pada fasad bangunan berorientasi jalan, membentuk pola ruang linier. Temuan ini sejalan dengan Khairi & Marsoyo (2021) yang menyatakan bahwa sektor informal biasanya menempati ruang kota dengan pola penyebaran memanjang mengikuti jalur jalan, baik menetap maupun semi menetap, dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan peluang ekonomi.

Perubahan juga menyentuh aspek ekologis. Sebagian kebun lama dikonversi menjadi ruang komunal atau lahan usaha, meski sejumlah pohon besar tetap dipertahankan sebagai peneduh dan penanda ekologis (Gambar 3).

Secara keseluruhan, perubahan fungsi dan tata guna ini memperlihatkan pergeseran dari ruang hunian homogen menuju kampung kota berlapis fungsi. Setiap bidang lahan maupun bangunan

berpotensi diadaptasi untuk menopang perekonomian warga, sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang muncul dari waktu ke waktu.

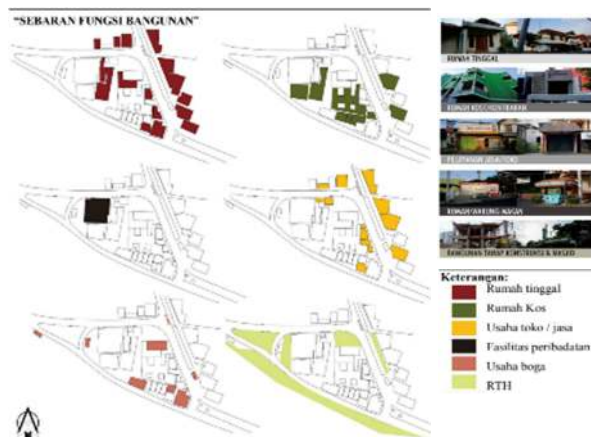


Gambar 3. Blok Sompilan Setelah Pembangunan Jalan
(Sumber: Analisis Penulis, 2025)

sebelum diintervensi oleh infrastruktur formal. Simbol ruang seperti Tugu Peringatan dan Tetenger Sleman Sembada memperkuat eksistensi kampung sebagai bagian dari lanskap kota melalui ekspresi identitas lokal yang bersifat kolektif dan simbolik (Gambar 5).



Gambar 5. Elemen Pendukung Ruang
(Sumber: Analisis Penulis, 2025)



Gambar 4. Peta Sebaran Fungsi Bangunan
(Sumber: Analisis Penulis, 2025)

4. Elemen Pendukung Ruang

Sompilan masih memiliki pepohonan rindang di sepanjang jalan yang memberikan peneduh. Namun, area yang minim vegetasi banyak dipenuhi elemen buatan seperti tiang utilitas, papan signage, dan tetenger. Kehadiran 12 *signage* publik dan 54 *signage* privat, mayoritas berupa *roof/wall signage* (29 unit), mengindikasikan dominasi aktivitas komersial informal dan strategi promosi yang menyesuaikan dengan bentuk bangunan. Tiang utilitas tersebar dengan fungsi beragam (jalan, listrik, telekomunikasi, BTS), menunjukkan pola jaringan infrastruktur yang ditumpangkan pada struktur spasial eksisting, menegaskan karakter kampung urban yang membentuk dirinya terlebih dahulu

5. Kepemilikan Lahan dan Bangunan

Pada awalnya lahan Sompilan dimiliki oleh dua keluarga: Mbah Mangun (sekitar 70 %) dan Mbah Tris (sisanya). Seiring waktu, lahan Mbah Mangun diwariskan ke Broto Waluyo, yang kemudian menghibahkan sebagian tanah untuk pembangunan masjid dan menjual bagian lain kepada kerabat dan pihak luar; tanah Mbah Tris dijual ke Marto, Saroyo, dan Pawiro. Akibat pewarisan, hibah, penjualan dan peralihan status, saat ini blok terdiri dari banyak pemilik dengan ukuran bidang yang bervariasi; tanah di zona tengah cenderung tetap dalam keluarga, sementara tepi jalan lebih dinamis karena dihibahkan, disewakan, atau dijual.

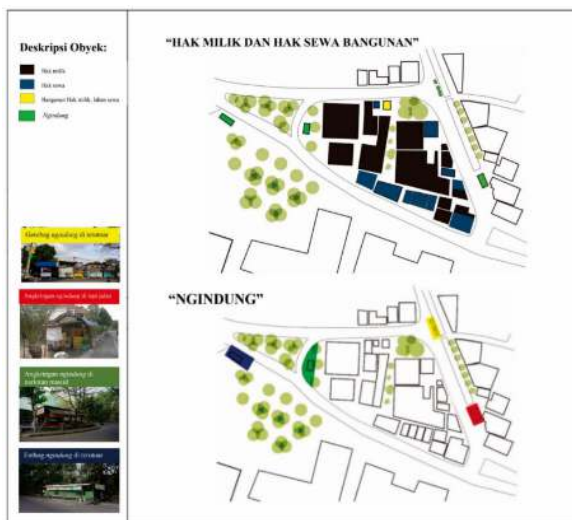
Selain hak milik, terdapat berbagai sistem sewa. Beberapa bangunan merupakan hak milik di atas tanah sewa; bangunan dapat didirikan oleh penyewa dengan kesepakatan lisan. Praktik *ngindung*—menumpang di tepi jalan tanpa membayar sewa—umum dijumpai di sisi barat dan selatan seperti pada Gambar 6. Warga memanfaatkan trotoar dan parkir masjid untuk warung angkringan, gerobak, atau usaha kecil; pemilik lahan menyediakan tempat, sementara pelaku usaha hanya hadir saat berdagang. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan dan relasi sosial, sehingga memperluas akses ruang bagi pelaku ekonomi yang tidak memiliki tanah.

Kepemilikan lahan dan bangunan di Sompilan dikelola melalui mekanisme kepemilikan yang saling tumpang tindih (hibrida). Temuan lapangan menunjukkan bentuk-bentuk utama sistem hibrida tersebut diantaranya:

1. Hak milik turun-temurun (formal)

2. Hibah dan penjualan sebagian lahan (Ada lahan yang dihibahkan (misalnya untuk pembangunan masjid atau dijual ke kerabat maupun pihak luar.)
3. Sewa tanah, tetapi bangunan milik penyewa (Beberapa penyewa mendirikan bangunan di atas tanah sewa)
4. *Ngindung* yaitu warga atau pedagang menggunakan sebidang tanah milik orang lain tanpa kontrak sewa resmi

Implikasi dari sistem kepemilikan hibrida di Blok Sompilan memunculkan konfigurasi spasial yang signifikan dimana: zona tengah lebih stabil, karena kepemilikan tanah di zona tengah diwariskan turun-temurun, rumah-rumah di sini cenderung tetap berfungsi sebagai hunian keluarga. Sedangkan zona tepian lebih dinamis dimana lahan tepian jalan hasil hibah, penjualan, atau sewa lebih berubah fungsi: dari rumah tinggal kos-kosan, toko, warung, laundry, bengkel, dll.



Gambar 6. Peta Kepemilikan di Blok Sompilan (Sumber: Analisis Penulis, 2025)

Produksi Ruang dan Negosiasi Spasial di Kampung Urban

Temuan konfigurasi spasial di Blok Sompilan menunjukkan bahwa kawasan ini berkembang melalui proses yang khas, tidak semata-mata sebagai hasil dari kekurangan sistem formal, tetapi justru sebagai bentuk adaptasi, agensi, dan ekspresi nilai-nilai lokal dalam memproduksi ruang hidup. Dalam kerangka teori *The Production of Space* oleh Henri Lefebvre (1991), ruang di Sompilan diproduksi melalui tiga lapisan: praktik spasial (*perceived space*), konsepsi ruang (*conceived space*), dan ruang yang dihidupi (*lived space*). Ketiganya saling bertaut dalam dinamika spasial kawasan ini (Sugiyono, 2022).

Pertama, secara spasial, kawasan ini menunjukkan *morfologi organik* yang terbentuk dari sejarah panjang penguasaan lahan, pewarisan, pembagian kapling, serta intervensi infrastruktur jalan. Hal tersebut sejalan dengan kajian mengenai informalitas yang memperlihatkan bahwa morfologi kampung kota lahir dari proses *settling* (menetap), *inserting* (menyisip), dan *attaching* (melekat), sehingga menghasilkan jaringan ruang yang tidak kaku, melainkan cair, adaptif, dan penuh improvisasi (Dovey, 2012; Dovey & King, 2011). Jalan-jalan besar yang membingkai kawasan Jalan Pogung Kidul, Selokan Mataram, dan Jembatan Baru, bukan hanya elemen infrastruktur, tetapi berfungsi sebagai ruang penggerak ekonomi. Bangunan yang menghadap jalan cenderung berkembang lebih cepat dan memiliki fungsi ganda seperti rumah tinggal + usaha atau rumah + kos, sementara area tengah yang lebih tersembunyi cenderung mempertahankan fungsi hunian keluarga yang diwariskan turun-temurun., dan ruang bersama tercipta dari halaman rumah, gang sempit, hingga tepian jalan.

Kedua, temuan memperlihatkan bahwa produksi ruang di Sompilan tidak bisa dipisahkan dari agensi sosial warga. Praktik ruang seperti "*ngindung*" (penggunaan lahan tanpa hak formal tetapi dengan izin pemilik) menunjukkan bentuk informalitas yang terbentuk berbasis relasi sosial dan etika lokal. Hal tersebut merupakan praktik *lived space* dalam kerangka Lefebvre, di mana warga memaknai ruang secara simbolik dan afektif, bukan sekadar sebagai objek fisik.

Dibandingkan area dalam blok yang cenderung stabil dengan status kepemilikan yang jelas, area tepi jalan menunjukkan karakter spasial yang lebih dinamis dan temporer. Meskipun tidak berbasis legalitas formal, *ngindung* merupakan sistem spasial yang bekerja melalui kepercayaan, saling mengenal, dan rasa saling menguntungkan antara pemilik dan pelaku usaha. Praktik ini menjadi solusi bagi warga non-pemilik lahan yang ingin mengakses peluang ekonomi di lokasi strategis tanpa biaya besar. Keberadaan *ngindung* memperkaya pemahaman tentang bagaimana ruang diproduksi dan dikelola secara non-formal dalam kampung urban. Gambar 7 menunjukkan sebaran titik-titik *ngindung* di Blok Sompilan dan dokumentasi visual berupa gerobak, angkringan, serta warung portabel yang menjadi simbol ketahanan ruang dan ekonomi warga dalam lanskap kota yang semakin terdesak oleh formalitas dan komersialisasi. Praktik *ngindung* ini juga menjadi bagian penting dari identitas sosial

ruang kampung, yang menunjukkan bahwa keberlanjutan hidup warga kota bukan hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada etika sosial dan solidaritas yang terbangun dari bawah.

Fenomena ini menunjukkan adanya spektrum kepemilikan yang tidak hitam-putih, tetapi membentuk sistem hibrida antara hak milik, sewa, dan penggunaan berbasis kepercayaan. Dalam konteks kampung kota seperti Blok Sompilan, sistem hibrida kepemilikan berarti: ada bangunan yang berdiri di atas tanah milik pribadi (formal), ada bangunan milik penyewa yang berdiri di atas tanah yang disewa (sewa tanah-bangunan milik penyewa), ada pula bentuk penggunaan lahan seperti “*ngindung*”, yaitu menempati lahan milik orang lain tanpa kontrak sewa resmi—berbasis relasi sosial atau kepercayaan. Semua bentuk ini berdampingan dan saling berinteraksi dalam satu kawasan yang sama.

Ketiga, temuan wawancara mengungkap adanya nilai keterikatan emosional terhadap tempat tinggal. Meski banyak warga menghadapi tekanan ekonomi dan transformasi lingkungan, sebagian besar menyatakan tidak ingin pindah dari Pogung karena ikatan batin dengan tanah kelahiran, kenangan masa kecil, serta kehendak untuk meneruskan warisan keluarga. Nilai ini berimplikasi besar terhadap strategi bertahan warga, seperti menyewakan sebagian rumah untuk usaha atau kos-kosan guna menopang ekonomi keluarga tanpa harus keluar dari kampung. Inilah bentuk dialektika ruang – warga tidak hanya bertahan, tetapi juga mereproduksi ruang secara aktif dalam relasi antara kebutuhan ekonomi dan nilai kultural.

Keempat, perubahan ruang fisik dalam hunian seperti penambahan lantai, konversi halaman menjadi area usaha, dan perubahan material dari “omah gedhek” menjadi rumah beton bertingkat mencerminkan transformasi ruang yang didorong oleh tekanan ekonomi. Temuan tersebut memperkuat tesis Dovey tentang *adaptive assemblage*, yakni bagaimana struktur spasial kampung informal tidak bisa dipisahkan dari relasi antaraktor, sejarah tempat, dan dinamika kebutuhan yang terus berubah.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa struktur spasial Blok Sompilan tidak bisa dipahami hanya sebagai ruang fisik, tetapi sebagai hasil dari produksi ruang berbasis praktik sosial, nilai lokal, dan interaksi antara warga dengan kekuatan eksternal (infrastruktur, ekonomi, institusi). Kampung bukan entitas yang

statis, melainkan hasil dari proses negosiasi ruang yang kompleks dan penuh makna.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konfigurasi Blok Sompilan adalah hasil produksi ruang yang kompleks dan adaptif, bukan sekadar akibat kekurangan sistem formal. Morfologi kawasan dibentuk oleh sejarah penguasaan dan pembagian lahan, pembangunan Selokan Mataram dan jalan-jalan baru, serta agensi sosial warga yang tetap bertahan karena ikatan emosional terhadap kampung. Zona tengah cenderung stabil sebagai hunian warisan, sedangkan tepian jalan dinamis dan multifungsi dengan kombinasi rumah, kos-kosan, dan usaha ekonomi. Sistem kepemilikan hibrida—warisan formal, sewa tanah dengan bangunan milik penyewa, serta praktik *ngindung*—menciptakan spektrum hak yang tidak hitam putih (Gambar 7).



Gambar 7. Struktur Ruang dan Nilai Spasial pada Kawasan Blok Sompilan (Sumber: Analisis Penulis, 2025)

Untuk penelitian sejenis, disarankan agar analisis dilakukan pada skala mikro, misalnya perubahan hierarki ruang di dalam rumah tinggal. Kajian komparatif antar kampung di Yogyakarta juga diperlukan untuk menguji generalisasi temuan ini. Penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam tentang dampak infrastruktur baru (seperti jalan arteri dan kanal irigasi) terhadap dinamika permukiman, serta merumuskan rekomendasi desain perkotaan yang sensitif terhadap nilai lokal. Kebijakan perencanaan kota sebaiknya mengakui keberagaman praktik ruang di kampung dan memberikan ruang bagi adaptasi ekonomi warga tanpa menghilangkan karakter permukiman organik.

DAFTAR PUSTAKA

Atika, F. A., & Ikaputra, I. (2023). Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara). *Media Komunikasi Geografi*,

- 24(2), 168–188.
<https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.65945>
- Dovey, K. (2012). Informal Urbanism and Complex Adaptive Assemblage. *International Development Planning Review*, 34(4), 349–368.
<https://doi.org/10.3828/idpr.2012.23>
- Dovey, K., & King, R. (2011). Forms of Informality: Morphology and Visibility of Informal Settlements. *Built Environment*, 37(1), 11–29. <https://doi.org/10.2148/benv.37.1.11>
- Fouad, Z., & Abbas, S. S. (2021). The Role of Urban Land Management on the Informal Settlements. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 754(1), 12014. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/754/1/012014>
- Hanli, N., & Lianto, F. (2020). Pembentukan Ruang Kolektif Sebagai Lanskap Kreatif Masyarakat Kampung Kota di Kebon Kacang. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2(1), 961–974.
<https://doi.org/10.24912/stupa.v2i1.6826>
- Harjoko, T. Y. (2011). Fenomena Bentuk dan Wujud Arsitektural: Antara Materialitas, Representasi dan Muatan Kehidupan Keseharian dari Permukiman Kampung Perkotaan. *NALARs: Jurnal Arsitektur*, 10(2), 131–154.
<https://doi.org/10.24853/nalars.10.2.%25p>
- Husin, D., Prijotomo, J., & Sugiharto, B. (2021). The Informality of Urban Kampung in Jakarta: A Model of an Architectural Form. *Journal of the International Society for the Study of Vernacular Settlements*, 8(4), 16–30. https://www.isvshome.com/pdf/ISVS_8-4/ISVS-8.4.2-Denny-Husain.pdf
- Ibadi, R. M. W. (2023). Dialektika Teori The Production of Space. *Journal of Architecture and Human Experience*, 1(2), 91–104.
<https://doi.org/10.59810/archimane.v1i2.11>
- KBBI. (2025). *Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/informalitas>
- Khairi, D. A., & Marsoyo, A. (2021). Sektor Informal: Peninjauan Kembali dalam Perspektif Konseptual. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 360–386.
<https://doi.org/10.20961/region.v17i2.47072>
- Lutzoni, L. (2016). In-formalised Urban Space Design. Rethinking the Relationship Between Formal and Informal. *City, Territory and Architecture*, 3(1), 20.
<https://doi.org/10.1186/s40410-016-0046-9>
- Mohanty, M. (2020). Challenges of Informal Urbanization. In *Sustainable Cities and Communities* (pp. 45–56). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-71061-7_53-1
- Nabila, F. E. (2023). Dialektika Spasial dan Produksi Beautifikasi Ruang Kota terhadap Pelaku Aktivitas Ekonomi Informal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 431–464.
<https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.71253>
- Sekhani, R., Mohan, D., Mistry, J., Singh, A., & Mittal, V. (2022). Examining the Informality in Urban Informal Settlements-Evidence from Kapashera. *Cities*, 123, 103591.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103591>
- Solak, S. (2022). Reading Architecture, City and Space in Latife Tekin's Novels Through Henri Lefebvre. *Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning*, 10(2), 185–194.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/gujsb/issue/70943/1123040>
- Sugiyono, P. B. (2022). Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 101–113.
<https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36309>
- UN-Habitat. (2025). *Definitions: Informal Settlements (Annex)*. Expert Group Meeting and Inter-sessional Thematic Meeting on the Definition of Informal Settlements. Nairobi: UN-Habitat.